

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBSI UNSRAT)

**PENERAPAN PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS UTARA**

Dedi Irawan Zebua, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea, Apriman Hura, Kurniawan Zai

Universitas Nias

ARTICLE INFO

Keywords:

Government Accounting Standards, Financial Statements

Kata Kunci:

Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan.

Corresponding author:

Dedi Irawan Zebua

dedizebua8@gmail.com

Abstract. *Assessing the financial performance of local governments can be done by looking at their performance, one of which is through the Budget Realization Report. . In this study, the researchers took the research locus at the Secretariat of the DPRD of North Nias Regency, which is the body that carries out the function of supporting local government finances. The main tasks of the North Nias DPRD Secretariat are to carry out secretarial administration, financial administration, support the implementation of the duties and functions of the Regional People's Representative Council and provide and coordinate the experts needed by the Regional House of Representatives in accordance with the regional financial capacity. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The sampling technique in this study was purposive sampling. The sample in this study is the 2022 Budget Realization Report for the DPRD Secretariat of North Nias Regency.*

Abstrak. Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya salah satunya adalah melalui Laporan Realisasi Anggaran. . Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokus penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara yang merupakan Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan pemerintah daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD Nias Utara yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Yang Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara tahun 2022.

PENDAHULUAN

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen yang sangat penting dapat mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik apabila kinerja belanjanya tidak melebihi dari dana yang telah dianggarkan.

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya salah satunya adalah melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna bagi pihak berkepentingan dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokus penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara yang merupakan Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan pemerintah daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD Nias Utara yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan fungsi antara lain yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggara administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu ukuran kinerja yang baik ditunjukkan dari laporan keuangannya setelah mendapat opini dari BPK. Saat ini ada beberapa kelemahan-kelemahan kinerja laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Hal tersebut ditunjukkan dengan Laporan Keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Alasan masih mendapat opini tidak wajar karena ada berbagai macam hal masalah seperti aset-aset yang belum tuntas serta penyusunan laporan keuangan tidak sesuai format PSAP 02. Dalam pengelolaan belanja, khususnya dalam belanja langsung, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara mengalokasikan anggaran belanja yang cukup besar, sedangkan realisasinya tidak mencapai target 100%, memang pada dasarnya dalam belanja tidak dianjurkan untuk melebihi batas maksimum, harus adanya efisiensi. Peneliti dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Diketahui bahwa adanya permasalahan terkait selisih anggaran pada belanja di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara ini, dari tahun ke tahun terdapat selisih anggaran yang tidak stabil. Jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Menurut Raymond Budiman (2021) Laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintah, untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), lalu juga Proses Akuntansi yang baik, sehingga terciptalah Laporan Keuangan yang baik, untuk dapat digunakan oleh pemerintah, pemeriksa, DPR, dan masyarakat (yang mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP 24 Tahun 2005 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah, dan keluaran dari sistem akuntansi itu pun nantinya harus sesuai dengan standar akuntansi. Singkatnya, SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan SAP. Jadi antara SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi Anggaran

Menurut (PSAP 2010 : 8) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Pendapatan

Menurut (PSAP 2010 : 8) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Akuntansi Belanja

Menurut (PSAP 2010 : 9) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx

Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten /kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- Pelayanan Umum	xxx
- Pertahanan	xxx
- Ketertiban dan Keamanan	xxx
- Ekonomi	xxx
- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
- Perumahan dan Permukiman	xxx
- Kesehatan	xxx
- Pariwisata dan Budaya	xxx
- Agama	xxx
- Pendidikan	xxx

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu

sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara tahun 2022.

PEMBAHASAN

Penerapan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara diperoleh hasil bahwa selama ini penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, peneliti melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas sesuai dengan PSAP 02 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Tahun 2022

NO	KODE PROGRAM/KEG/REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
I	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp19.189.755.985	Rp18.245.289.784	Rp944.466.201
1	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp74.034.024	Rp71.361.306	Rp2.672.718
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp56.456.227	Rp55.583.509	Rp872.718
	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp17.577.797	Rp15.777.797	Rp1.800.000
2	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.395.476.095	Rp1.088.112.224	Rp307.363.871
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.069.250.000	Rp781.630.000	Rp287.620.000
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp247.335.391	Rp228.728.648	Rp18.606.743
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp4.949.022	Rp4.809.654	Rp139.368
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp3.001.000	Rp2.972.000	Rp29.000
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.000.182	Rp7.999.242	Rp940
	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp-
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp54.898.546	Rp54.527.680	Rp370.866
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp5.041.954	Rp4.445.000	Rp596.954
3	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp1.270.802.000	Rp1.224.492.094	Rp46.309.906

	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp41.850.000	Rp35.650.000	Rp6.200.000
	4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.100.000	Rp2.100.000	Rp-
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp1.226.852.000	Rp1.186.742.094	Rp40.109.906
4	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.195.359.692	Rp1.119.328.426	Rp76.031.266
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.065.805	Rp30.032.500	Rp33.305
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp-	Rp-	Rp-
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp712.046.478	Rp708.114.400	Rp3.932.078
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp108.088.409	Rp104.272.750	Rp3.815.659
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp100.000.000	Rp56.880.000	Rp43.120.000
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp245.159.000	Rp220.028.776	Rp25.130.224
5	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp377.252.400	Rp373.469.000	Rp3.783.400
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp377.252.400	Rp373.469.000	Rp3.783.400
6	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.645.369.515	Rp1.574.586.176	Rp70.783.339
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp8.000.000	Rp3.300.000	Rp4.700.000
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp299.986.830	Rp234.536.176	Rp65.450.654
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.337.382.685	Rp1.336.750.000	Rp632.685
7	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp511.910.000	Rp419.508.218	Rp92.401.782
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp320.890.000	Rp233.860.853	Rp87.029.147
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp91.020.000	Rp89.095.000	Rp1.925.000
	4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.000.000	Rp96.552.365	Rp3.447.635
8	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp12.630.373.622	Rp12.294.772.340	Rp335.601.282
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp11.796.909.622	Rp11.542.588.808	Rp254.320.814
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp262.500.000	Rp262.283.000	Rp217.000
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp570.964.000	Rp489.900.532	Rp81.063.468
9	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Rp89.178.637	Rp79.660.000	Rp9.518.637
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp9.109.091	Rp-	Rp9.109.091
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp80.069.546	Rp79.660.000	Rp409.546

II	04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp11.168.208.076	Rp9.681.352.597	Rp1.486.855.479
10	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp2.620.535.506	Rp2.048.530.441	Rp572.005.065
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp720.326.364	Rp651.424.144	Rp68.902.220
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp953.440.909	Rp863.984.568	Rp89.456.341
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp476.577.235	Rp408.553.473	Rp68.023.762
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp470.190.998	Rp124.568.256	Rp345.622.742
11	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.054.251.853	Rp965.686.340	Rp88.565.513
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp210.983.027	Rp206.214.186	Rp4.768.841
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp210.997.883	Rp209.997.636	Rp1.000.247
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rp210.070.717	Rp187.608.425	Rp22.462.292
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rp211.201.136	Rp156.751.538	Rp54.449.598
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp210.999.090	Rp205.114.555	Rp5.884.535
12	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp4.467.939.582	Rp4.188.116.799	Rp279.822.783
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp1.295.483.909	Rp1.155.684.486	Rp139.799.423
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp1.383.083.445	Rp1.342.855.099	Rp40.228.346
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp1.418.167.046	Rp1.371.424.894	Rp46.742.152
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Rp221.205.182	Rp188.686.190	Rp32.518.992
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp150.000.000	Rp129.466.130	Rp20.533.870
13	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp1.520.403.636	Rp1.024.299.000	Rp496.104.636
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp75.753.636	Rp73.575.000	Rp2.178.636
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Rp1.444.650.000	Rp950.724.000	Rp493.926.000
14	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp453.444.499	Rp435.830.205	Rp17.614.294
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp203.066.499	Rp185.999.720	Rp17.066.779
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp250.378.000	Rp249.830.485	Rp547.515
15	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp1.051.633.000	Rp1.018.889.812	Rp32.743.188
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp651.895.000	Rp637.517.451	Rp14.377.549
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp399.738.000	Rp381.372.361	Rp18.365.639

Surplus/Defisit	Rp8.021.547.909	Rp8.563.937.187	-
------------------------	------------------------	------------------------	----------

Sumber : Data diolah berdasarkan PSAP 02

Dari hasil tabel 4.1 di atas diperoleh hasil bahwa setelah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara menerapkan PSAP 02 dalam penyusunan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran maka diperoleh surplus pada anggaran sebesar Rp 8.021.547.909 dan pada saat realisasi anggaran sebesar Rp 8.563.937.187 sehingga tidak terdapat sisa anggaran selama satu periode pelaporan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
3. Setelah penerapan PSAP 02 dalam penyusunan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran maka diperoleh surplus pada anggaran sebesar Rp 8.021.547.909 dan pada saat realisasi anggaran sebesar Rp 8.563.937.187 sehingga tidak terdapat sisa anggaran selama satu periode pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, Rahardja (2014). "Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah" : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Alamsyah, F., Saerang, I.S., Tulung, J. E. (2019). Analisis Akurasi Model Zmijewski, Springate, Altman, Dan Grover Dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v7i2.49101>
- Bastian, Indra (2016). "Anggaran Sektor Publik" : Erlangga, Jakarta.
- Faud, M. Ramli (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalis Indonesia
- Halim, Abdul (2017). "Pengelolaan Keuangan Daerah" : UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ihyani, L., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2021). Pengaruh SAP Dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Refocusingdan Realokasi Anggaran Sebagai Pemoderasi. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.36653>
- Kartiwa (2012). "Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dan Arah Kebijakan Umum"
- Kurniawati, Apriliani Adeayu, & Lestari, H. S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Well-Being. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1577–1598. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.43155>
- Mahmudi (2010). "Manajemen Keuangan Daerah" : Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Noerdiawan, Deddy. Iswahyudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati (2017). "Akuntansi Pemerintahan" :

Salemba Empat, Jakarta

Nur Fadilla, F., & Usman, B. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Dan Intensi Strategi Pensiun Terhadap Perencanaan Pensiun Pada Karyawan Di Jabodetabek. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 9(3), 1685–1707. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.43152>

Sabeni dan Ghazali (2016). “Akuntansi Pemerintahan” : BPFE, Yogyakarta.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02, 2010. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71. Jakarta : Pemerintah Pusat.